

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih giat melakukan pembangunan di berbagai sektor nasional. Dalam melaksanakan pembangunan Indonesia masih mengalami masalah, salah satunya masalah di bidang perekonomian. Indonesia pernah mengalami krisis moneter tahun 1997 yang berdampak besar di dua sektor yaitu hotel dan restoran (Yuliantini dan Supadmi, 2015). Sebagai negara yang masih melaksanakan pembangunan nasional Indonesia memiliki dua sistem pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat di Indonesia bertugas sebagai parlemen yang paling tinggi untuk mengurus negara secara keseluruhan, sedangkan pemerintahan daerah mengurus setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah diberi kewenang oleh pemerintahan pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka untuk melaksanakan *good governance* yang baik sistem pemerintahan daerah menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah.

Otonomi daerah menjadikan suatu pemerintahan daerah untuk berfikir untuk mencari sumber dana penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran daerah. Biaya belanja daerah pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Selain dari Pendapatan Asli Daerah pemerintah pusat juga membantu transfer dana perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak) serta dari Dana Alokasi Umum sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka menjadi cermin keberhasilan suatu daerah tersebut.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah dituntut mampu memanfaatkan sumber-sumber yang berpotensi dipungut pajak dan retribusi daerah. Pembagian pajak di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah demi terlaksananya penyelenggaraan dan pembangunan daerah ( Siahaan, 2009). Pajak Daerah di pungut dengan cara yang beragam, pemungutan Pajak Daerah harus memiliki ketentuan di lapangan.

Berdasarkan UU Nomer 28 Tahun 2009 ada lima jenis pajak Provinsi dan sebelas pajak jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri diantaranya adalah :

- (1) Pajak Kendaraan Motor,
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Motor,
- (3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- (4) Pajak Air Permukaan,
- (5) Pajak Rokok.

sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota diantaranya :

- (1) Pajak Hotel,
- (2) Pajak Restoran,
- (3) Pajak Hiburan,
- (4) Pajak Reklame,
- (5) Pajak Penerangan Jalan,
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- (7) Pajak Parkir.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang di jalankan Pemerintah Daerah menetapkan beberapa larangan peraturan daerah yang dapat



menyebabkan ekonomi biaya tinggi, pendapatan mobilitas penduduk, pendapatan logistik barang dan jasa antar daerah, juga kegiatan ekspor impor barang. Menurut UU Nomer 18 Tahun 1997, Pajak Hotel di samakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan undang-undang yang di keluarkan oleh Pemerintah yaitu UU Nomer 34 Tahun 2000 yang sebagaimana Pajak Hotel dan Pajak Hotel di pisahkan dan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri.

Hotel dan restoran adalah sektor potensial yang di manfaatkan daerah untuk meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran juga kontribusi yang bisa diberikan oleh hotel dan restoran untuk membangun ekonomi Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan daerah otonomi yang dibentuk dengan tidak luput dalam penerapan konsep desentralisasi yang terjadi di daerah-daerah lain, sehingga Kabupaten Malang sendiri di beri wewenang mengenai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri demi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Dengan dilimpahkannya wewenang tersebut Kabupaten Malang membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri ataupun lokal, Kabupaten Malang masih harus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari objek wisata yang dimiliki oleh daerah. Dengan hal tersebut mendorong para investor juga pengusaha untuk membangun hotel, restoran, tempat hiburan dengan fasilitas dan yang menarik untuk di kunjungi, yang juga tersebar di seluruh Kabupaten Malang, dengan begitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu : Fikri dan Mardani (2017) meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2012-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan : (1) Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar  $0,000 < 0,05$ : (2) Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu Tahun 2012-2016, ditunjukkan dengan Pajak Restoran sebesar  $0,004 < 0,05$ : dan (3) Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hiburan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Memah (2013) meneliti efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007- 2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Lasmini dan Wuku Astuti (2019) meneliti tentang pengaruh efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel, dan kontribusi restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman. Menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Sedangkan efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak hotel dan kontribusi pajak restoran secara bersama berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini adalah replikasi penelitian Fikri dan Mardani (2017) yang merupakan kombinasi penelitian Memah (2013). Fikri dan Mardani (2017) mengambil objek pajak hotel dan pajak restoran dan di kombinasikan dengan penelitian Memah (2013) rasio efektivitas dan kontribusi untuk dijadikan



variabel penelitian, dan melanjutkan penelitian Lasmini dan Wuku Astuti (2019) yang memakai lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan variabel penelitian yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini memiliki judul **“Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2019”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah efektivitas pajak hotel mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ?
2. Apakah efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ?
3. Apakah kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ?
4. Apakah kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
2. Pengaruh efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
3. Pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
4. Pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan juga memperluas wawasan peneliti tentang efektivitas dan juga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
2. Sebagai acuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
3. Sebagai referensi untuk peneliti melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.
4. Sebagai tambahan ilmu tentang perpajakan untuk waktu yang akan datang..

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dimana setiap bab dengan bab yang lain terdapat keterkaitan. Adapun proposal metodologi penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang antara lain meliputi penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini dan teori-teori yang menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memberikan penguraian mengenai metode penelitian antara lain adalah jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode



pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam pemecahan masalah.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian jawaban atas perumusan masalah dan pengujian hipotesis yang ada beserta interpretasi atas hasil yang diperoleh.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta saran yang sebaiknya dilakukan sebagai penyempurnaan atas keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini.

